

## Papua "Bergejolak" Tidak Bisa Dibiarkan

Jumat , 30 Agustus 2019 | 10:23

[http://www.sinarharapan.co/umum/read/7605/istana\\_sebut\\_papua\\_bergejolak\\_tidak\\_bisa\\_dibiarkan](http://www.sinarharapan.co/umum/read/7605/istana_sebut_papua_bergejolak_tidak_bisa_dibiarkan)



Sumber FotoDok/Ist Presiden Jokowi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto melakukan langkah strategis untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Papua dan Papua Barat. Terutama terkait aksi-aksi di sejumlah kabupaten/kota di sana yang beberapa di antaranya berujung keributan.

Jokowi juga sekaligus menginstruksikan untuk bertindak secara tegas siapapun yang melakukan kekerasan dan perusakan fasilitas publik. Terbaru, demonstrasi yang berujung keributan terjadi di Jayapura, Papua, Kamis (29/8/2019).

"Presiden selalu mengarahkan bahwa pendekatan kemanusiaan itu paling penting dan terdepan. Namun bukan berarti pendekatan keamanan tidak diperlukan," kata Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani ketika dihubungi, Jumat (30/8/2019).

Perempuan yang akrab dipanggil Dani ini mengatakan pendekatan keamanan menjadi upaya terakhir pemerintah yang dilakukan dengan standar operasional terukur dan akuntabel. Ia meminta semua pihak memahami bahwa yang harus dilakukan saat ini adalah menghentikan 'gejolak' di Bumi Cendrawasih. "Ini bukan lagi demonstrasi damai. Melainkan sudah anarkis, sudah menjelma keributan," ujarnya.

Dani menyebut persoalan yang terjadi di Papua dan Papua Barat begitu kompleks, bukan hanya persoalan kesejahteraan semata, tetapi juga masalah keamanan. Menurutnya, tindakan merusak fasilitas umum dan potensi kekerasan atau bahkan penghilangan nyawa seseorang tak mungkin dibiarkan begitu saja. Harus perlu diambil tindakan sesuai konteks dan proporsional."Nanti kalau dibiarkan, negara akan dituduh melakukan pembiaran. Jadi semua itu harus diletakkan sesuai konteksnya dan diletakkan secara proporsional," tuturnya seperti dilaporkan *cnnindonesia.com*.

Dani menyatakan tindakan rasial kepada siapapun, termasuk masyarakat Papua harus ditolak. Terkait insiden di Asrama Mahasiswa Papua, Surabaya, Jawa Timur, kata Dani, Polri pun telah menetapkan tersangka dan akan dikenai sanksi hukum yang tegas.

Menurutnya, Jokowi juga sudah menyerukan penegakan hukum tegas kepada para pihak yang 'rasis'. Karena itu tindakan rasial segelintir oknum jangan lantas digeneralisasi seakan itu adalah sikap sebuah komunitas suku atau etnis tertentu."Insiden Malang dan Surabaya merupakan pembelajaran bagi kita semua, agar mengikis dan menghilangkan sikap rasialis dalam diri kita. Dan memandang manusia setara," katanya.

Dalam merespons gejolak ini, lanjut Dani, Jokowi juga akan mengundang para tokoh Papua untuk berdialog bagi kepentingan di sana. Ia mengatakan tugas semua pemangku kepentingan untuk ikut meredam situasi yang panas ini."Papua adalah kita. Kewajiban kita semua untuk menciptakan Papua yang berkeadilan dan menjunjung nilai kemanusiaan," dia menambahkan.

## Fahri Hamzah Kritik Jokowi

### Soal Penanganan Papua

Jumat , 30 Agustus 2019 | 10:12



Sumber Foto Dok/Ist Fahri Hamzah

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik pemerintah dalam penanganan situasi di Papua. Fahri meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak hanya memberikan imbauan-imbauan datar.

"Perkembangan terbaru di Papua itu sesungguhnya memerlukan langkah-langkah yang luar biasa dari Presiden. Tidak bisa Presiden hanya mengeluarkan imbauan-imbauan yang datar ya, dalam situasi seperti sekarang," kata Fahri kepada wartawan, Jumat (30/8/2019).

Menurut Fahri, harus ada pesan solidaritas yang disampaikan kepada masyarakat Papua. Fahri meminta Jokowi menjelaskan rencana jangka pendek dan panjang untuk membangun kepercayaan masyarakat Papua.

"Dan karena itu lah, Presiden harus mewakili seluruh bangsa Indonesia, dan menjelaskan secara gamblang rencananya-rencanya ke depan dan tindakan-tindakan yang harusnya sudah diambil dan akan diambil dalam rangka kembali membangun kepercayaan masyarakat," ujarnya.

"Sambil tentunya mendengar apa yang sekarang dalam jangka pendek dituntut oleh masyarakat dan lalu kemudian kita mencoba membangun pengertian jangka panjang tentang keadaan kita," katanya seperti dikutip *detik.com*.

Fahri menyebut Jokowi akan menyesal jika hanya membuat pernyataan datar dan terlambat bertindak. Menurutnya, apa yang terjadi di Papua bukanlah persoalan kecil.

"Jadi sekali lagi, Presiden perlu mengambil langkah-langkah yang luar biasa. Karena persoalan ini bukan persoalan kecil. Kalau dianggap kecil, itu salah. Persoalan ini ada akar terdalamnya, ya. Dan akar terdalamnya itu ada dalam hati yang tidak mudah kita baca secara kasat mata," ucapnya.

Ia mengatakan pemimpin Indonesia memiliki tugas berat karena luas wilayah dan disparitas yang ada. Selain jarak fisik, ada jarak psikologis yang harus dijembatani. "Jarak antara Jakarta dan Papua itu tidak saja mengandung jarak fisik, tetapi juga mengandung jarak-jarak lain, termasuk jarak psikologis dan lain sebagainya, yang semuanya harus dijembatani dengan rencana-rencana yang luar biasa. Kalau kita tidak sanggup, sekali lagi, pihak yang bermain di kasus Papua selalu banyak, terutama pihak internasional yang selalu ingin agar kedamaian dan stabilitas di Papua itu tidak pernah selesai," dia menegaskan.